

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berlandas perolehan riset, penerapan kegiatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bengkulu menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Mengacu pada dasar penerapan George C. Edward III diketahui jika, pada bidang komunikasi, pelaksanaan sosialisasi program IKD belum optimal. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, jangkauannya masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang kurang aktif secara digital. Oleh sebabnya, mesti terdapat penaikkan diseminasi yang lebih menyeluruh dan merata. Dari sisi sumber daya, pelaksanaan program tergolong memadai. Tersedianya dua operator IKD yang aktif melayani masyarakat serta dukungan sarana seperti laptop, komputer, dan handphone telah menunjang kelancaran proses pendaftaran IKD. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan sikap positif berupa komitmen dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas, termasuk dalam memberikan pelayanan pendaftaran IKD secara konsisten setiap hari kerja. Sementara itu, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku, mencerminkan adanya keteraturan dan kepatuhan administrasi di lingkungan pelaksana. Dengan demikian, meskipun implementasi program IKD telah terlaksana dengan cukup baik dari bidang sumber daya, instruksi, dan struktur birokrasi, meskipun aspek

komunikasi masih perlu ditingkatkan agar program ini dapat diakses secara lebih luas dan merata oleh seluruh khalayak.

5.2 Saran

Adapun masukan yang disampaikan oleh pengkaji terkait implementasi program Identitas Kependudukan Digital di Kota Bengkulu, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu mesti memperluas cakupan diseminasi program IKD, tidak hanya melalui media digital, tetapi juga dengan pendekatan langsung ke masyarakat seperti melalui kegiatan kelurahan, RT/RW, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas warga. Sosialisasi juga sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik demografi masyarakat, terutama untuk menjangkau kelompok yang kurang paham teknologi.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan media informasi. Pemerintah Kota dapat memaksimalkan penggunaan media sosial, situs resmi pemerintah, serta bekerja sama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi mengenai manfaat dan tata cara pendaftaran IKD secara menarik dan mudah dipahami.
3. Peningkatan kolaborasi antar instansi. Untuk mendukung kelancaran implementasi, perlu adanya kerja sama antara Dinas Dukcapil dengan instansi lain seperti sekolah, universitas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, agar informasi dan akses terhadap IKD dapat tersebar lebih luas.

4. Perluas jadwal dan lokasi pelayanan. Menyediakan jadwal layanan yang lebih fleksibel, seperti pelayanan di akhir pekan atau di luar jam kerja tertentu, serta memperluas lokasi pelayanan seperti di pusat perbelanjaan, kantor kecamatan, atau tempat publik lainnya agar lebih mudah dijangkau masyarakat.